POLITIK INKLUSIF MUHAMMADIYAH

Narasi Pencerahan Islam untuk Indonesia Berkemajuan

Prolog:

Dr. H. Haedar Nashir, M.Si

Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P

Editor:

Ridho Al-Hamdi

David Efendi

Bachtiar Dwi Kurniawan

Hilman Latief

UMY PRESS

BAB 2 MUHAMMADIYAH DAN POLITIK KESEJAHTERAAN: *BEST PRACTICES* DI BIDANG PEMBERDAYAAN, LINGKUNGAN, FILANTROPI, DAN KEBENCANAAN

- Muhammadiyah dan Keberdayaan Kaum Rentan ~ Ahmad Ma'ruf – 65
- Muhammadiyah dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat ~ Hempri Suyatna – 72
- Transformasi Spirit Al-Maun dalam Tiga Gerakan Dakwah bagi Pekerja Migran Indonesia di Taiwan ~ Andi Azhar – 78
- Etika Hijau Muhammadiyah ~ David Efendi – 85
- Penyelamatan Lingkungan sebagai Jihad Muhammadiyah di Abad Kedua ~ Rijal Ramdani – 90
- Respon Muhammadiyah atas Persoalan Lingkungan ~ David Efendi – 101
- Gerakan Sosial-Ekologi Muhammadiyah ~ David Efendi – 108
- Muhammadiyah, Filantropi, dan Lingkungan Hidup ~ Masmulyadi – 114
- MDMC: Meneguhkan Peran Kemanusian dan Kebencanaan Muhammadiyah ~ Rahmawati Husein – 120
- Sekolah Muhammadiyah Aman Bencana ~ Arif Jamali Muis – 126

BAB 3 MUHAMMADIYAH DAN POLITIK KEBANGSAAN YANG BERADAB

- Muhammadiyah, Pancasila, dan Ideologi Negara-Bangsa ~ Bachtiar Dwi Kurniawan – 133
- Memperkuat Pilar Keadilan untuk Indonesia Berkeadaban ~ Irvan Mawardi – 137
- Beragama yang Mencerahkan: Implementasi Kerja Kemanusiaan Relawan Muhammadiyah ~ Arif Jamali Muis – 144
- Sekolah Politik Muhammadiyah: Upaya Menambal Defisit Kader Politik Intelektual ~ Roni Tabroni – 148
- Menggagas Sekolah Politik Indonesia Berkemajuan: Strategi Politik Non-Praktis Muhammadiyah dalam Kompetisi Elektoral ~ Suswanta – 153

Penyelamatan Lingkungan Sebagai Jihad Muhammadiyah di Abad Kedua: Tantangan dan Masa Depan MLH Muhammadiyah

Oleh: Rijal Ramdani[1]

Pendahuluan

Sekitar tahun 2013, saat mengikuti diskusi yang diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Kader PP. Muhammadiah, salah satu pembicara, Hilman Latief PhD, yang baru saja pulang dari studinya di Belanda menyampaikan satu kalimat yang penulis catat dan penulis ingat dengan baik. Kata beliau "Muhammadiyah di abad Ke-1 telah berhasil menyelesaikan pendakian satu gunung. Saatnya di abad ke-2 mendaki gunung yang lain". Yang dimaksud dengan gunung pertama adalah bidang pendidikan, kesehatan, dan urusan yatim-piatu, sementara gunung kedua yang seharusnya mulai didaki adalah issue baru. Menurut hemat penulis, salah satu issue yang harus mendapatkan prioritas utama selain dari issue bencana adalah issue lingkungan.

Pertama, di Indonesia, saat ini, kita dihadapkan pada kerusakan-kerusakan lingkungan yang sangat massive seperti banjir, kekeringan, longsor, kebakaran hutan, sampah, air sungai yang tercemar, abrasi, dll. Hal tersebut, baik sebagai akibat dari kebijakan pemerintahan masa lalu yang memberikan konsesi besar-besaran atas izin penguasan lahan, hutan, tambang, dan perkebunan kepada perusahaan-perusahaan tertentu (McCarthy, 2010), maupun ekspansi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap sumberdaya alam akibat dari tekanan kebutuhan ekonomi jangka pendek (Nesadurai, 2018). Thesis Malthus perlu kita renungkan ulang, semakin tinggi pertumbuhan populasi penduduk maka semakin berat tekanan yang dihadapi oleh alam dari kebutuhan hidup manusia (Urdal, 2005). Lebih-lebih, baik perusahan maupun masyarakat sudah dijangkiti penyakit "serakah" dengan seenaknya menghabisi sumberdaya alam untuk keinginan dirinya sendiri. Inilah yang dinamakan oleh Garret Hardin sebagai 'greedy' (Hardin, 1968) dan di dalam al-Qur'an surat Arrum (30:41) Allah nyatakan:

(1) "*Telah Nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia (maksiat/ rakus), supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*"

Kedua, ada issue substantial yang harus sama-sama kita renungkan atas konsitusi yang kita miliki. Di dalam UUD 1945 pasal 33 dikatakan, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menegasakan, bahwa Negara adalah satu-satu aktor, yang menguasai seluruh sumberdaya alam, mengontrolnya untuk memberikan izin bagi yang ingin menggunakan, seberapa besar yang bisa digunakan, bagaimana batas-batas penggunaannya, dan seberapa lama penggunaannya itu. Inilah yang dinamakan dengan *state-control regime*, yaitu negara dominan dalam penguasaan sumberdaya alam (Grafton, 2000).

Beberapa ilmuan memberikan kritik, seperti misalkan Nancy Lee Pelluso (1993). Dimana menurutnya, dalam kenyataannya sebetulnya negara, melalui pemerintah, memiliki

---

[1] Penulis adalah anggota Majelis Lingkungan Hidup (MLH) PP. Muhammadiyah. Kartu tanda anggota dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cisompet, Kabupaten Garut Jawa Barat, sebagai asal penulis. Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dari 2007 – 2014. Tenaga pengajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY sejak 2015 dan saat ini sedang menempuh pendidikan Doctoral (PhD) di *Institute of Natural Resources, University of Eastern Finland*.

keterbatasan untuk mengontrol sumberdaya alam yang terlalu banyak tersebut (Peluso, 1993). Sebagai contoh, 60 persen daratan Indonesia ditetapkan sebagai Kawasan hutan (Safitri, 2010), mampukah pemerintah mengontrol sumberdaya hutan seluas itu? Tentu saja berat, dengan keterbatasan sumberdaya manusia, peralatan, waktu dan dukungan finansial yang ada. Sumber daya alam tersebut lebih banyak menjadi barang bebas yang tidak terurus, atau sebagai *open access common-pool* (Ostrom, 1990). Akibatnya banyak orang yang merambahnya dengan tidak bertanggung jawab baik yang dilakukan oleh korporasi, kelompok masyarakat, maupun perorangan. Sudah dapat dipastikan, yang terjadi adalah kehancuran-kehancuran yang sukar untuk diselesaikan. Garrett Hardin (1968) menyebutnya sebagai "*ruin*". Keseimbangan sebagai titik *equilibrium* menjadi hilang karena alam sebagai penyeimbang dan pengendalinya hancur.

Ketiga, arah pembangunan dunia telah berubah dari *human centre* ke *environmental protection*. Sebagai contoh sebelum tahun 2015, United Nation of Developments Programme (UNDP) menjadikan Millenium Development Goals (MDGs) sebagai target dari pembangunan dunia yang diadopsi oleh hampir seluruh negara di dunia. Sehingga issu Pendidikan, kesehatan, dan pendapatan ekonomi menjadi sangat sentral di era tersebut (Sen, 2001; Ul Haq, 1995). Akan tetapi setelah tahun 2015, arah pembangunan dunia berubah dengan menjadikan lingkungan sebagai target utama atau lebih dikenal dengan istilah *sustainable development goals* (SDGs) (Sachs, 2015). Komunitas internasional selalu mewanti-wanti pentingnya mengedepankan proteksi terhadap lingkungan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi atau kemakmuran yang justru dikemudian hari akan menyisakan kerusakan-kerusakan llingkungan yang tidak terkendali (Harris, 2000).

Sebagai kekuatan civil society dan kekuatan umat Islam terbesar di Indonesia, maka Muhammadiyah memliki tanggung jawab besar untuk menjawab tantangan-tantangan dari kerusakan lingkungan tersebut. Tanggung jawab tersebut, baik dalam tataran fiolosphis dalam memberikan sumbangsih ide tata kelolola baru sumberdaya alam di Indonesia, maupun dalam tataran praksis ikut menyelesaikan masalah-masalah lingkungan yang ada dan mengusahakan terbentuknya masyarakat Islam yang ramah terhadap lingkungan. Tanggung jawab ini tidak boleh dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan untuk menjawab tantangan dari luar, seperti tututan dunia internasional dan pemerintah, akan tetapi kita harus memaknainya sebagai bentuk kesadaran Muhammadiyah, sebagai bentuk ibadah dan dakwah warga Muhammadiyah, dan lebih jauh sebagai bentuk jihad Muhammadiyah di abad Ke-2. Sehingga Muhammadiyah bisa benar-benar menjadi "ummatan wasata" dan "khaira ummah". Umat yang pantas dijadikan sebagai contoh bagi umat lain karena apa yang kita lakukan hanya representasi dari keagungan dan keindahan aklak Nabi Muhammad SAW (Katsir, 1999).

Konsepsi Masyarakat Islam Sebenarnya Yang Ramah Lingkungan

Secara ideologis, Muhammadiyah memiliki basis untuk mengatakan bahwa bergerak menyelamatkan lingkungan dan mengusakan masyarakat yang ramah lingkungan merupakan jihad Muhammadiyah di abad Ke-2. Di dalam Anggaran Dasar dinyatakan bahwa maksud dan tujuan dari Muhammadiyah adalah "menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya". Banyak ragam tafsir yang menjelaskan bagaimana sebetulnya bentuk atau kriteria dari masyarakat Islam yang sebenarnya tersebut. Akan tetapi mayoritas menjadikan masyarakat Madinah dan negri Saba, yang Allah abadikan di dalam al-Qur'an sebagai cerminan dari masyarakat Islam tersebut.

Sebagai contoh, dengan merujuk pada masyarakat Madinah, M. Yunan Yusuf yang menjelaskan bahwa masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu adalah apabila Individu-individunya utama, sadar akan keberadaannya sebagai abdullah dan kedudukannya sebagai khalifatullah (Nashir, 2010). Di sisi lain sistem dan tatanan sosial, serta budaya yang dikembangkan kondusif bagi terwujudya kehidupan yang aman, adil dan makmur, baik secara materil dan spiritual (Nashir, 2010). Ahmad Salaby membandingkannya dengan masyarakat Jahilayah yang senang mabuk-mabukan, makan bangkai, zinah, tanpa hukum, perbudakan, perempuan direndahkan, dan perang antar suku (Nashir, 2010). Kondisi tersebut berbeda dengan setelah datangnya Rasulullah dimana masyarakat begitu beradab dan teratur; dari mata pedang ke jalan damai, dari egoisitas kekuatan ke peraturan perundangan, dari balas dendam ke Qishas, dari serba halal ke kesucian, dan dari suka merampas ke kepercayaan (Nashir, 2010). Allah panggil di dalam al-Qur'an surat Ali Imran, keindahan masyarakat Islam tersebut dengan sebutan "Khaira Ummah" atau ummat terbaik yang mencontoh akhlak baginda Nabi Muhammad "al-ummah al-muhammadiyah (Katsir, 1999)".

Sementara sebahagian cendikiawan lain merujuknya pada kata *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* yang terdapat di dalam surat Saba ayat 15 sebagai gambaran dari kesejahteraan penduduk dan kesuburan negri itu di masa lampau. Darinya diambil gambaran bahwa masyarakat Islam yang sebenarnya itu adalah masyarakat yang penduduknya memiliki pola hubungan harmonis sehingga kesatuan dan persatuan antar sesama penduduk dapat terpelihara dengan baik (Markus, 2009). Sekalipun tidak menutup kemungkinan penduduknya berbuat dosa dan durhaka, akan tetapi dengan segara melakukan kontemplasi untuk kemudian memohon ampunan kepada Allah, dan Allah pun dengan segera memafkan kesalahan-kesalahannya. Keteraturan alam pun terjadi, kerusakan tidak terjadi, karena manusia mau dan dengan suka rela mengikuti aturan Allah, karena dengan seperti itulah niscaya manusia akan mendapati keamanan dan kesejahteraannya (Markus, 2009).

Dari Konsepsi-konsepi itulah, baik dengan merujuk pada kata *khaira ummah* maupun *baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur* dapatlah diambil suatu konsepsi oprasional mengenai masyarakat Islam yang sebenar. Secara perseorangan, individu per individu, memiliki karakteristik berTuhan, beribadah serta hanya tunduk dan patuh kepada Allah; perjuangan dan langkahnya hanya berpegang teguh kepada ajaran Allah; beraktivitas di dalam setiap bidang hanya menempuh jalan yang diridhai Allah; dan menjunjung tinggi hukum Allah di atas hukum yang manapun (Markus, 2009). Sementara secara komunal; hidup dalam kesejahteraan baik atas dasar jaminan Negara, kedermawanan, ketersediaan dari alam atau buah dari semangat dalam bekerja; masyarakat yang demokratis karena mengedepankan permuyawaratan dalam setiap pengambilan kebijakan menyangkut urusan bersama; masyarakat yang kondusive karena hukum Allah yang menjadi landasan dan pijakan dalam berinteraksi secara komunal; dan bersifat adil satu sama lain karena saling menghargai dan menjunjung tinggi kesetaraan (Markus, 2009).

Akan tetapi dari konsepsi operasional tersebut belum terumuskan bagaimana sebetulnya kriteria lingkungan dari masyarakat Islam yang sebenarnya itu? Sehingga dalam tulisan ini akan dijelaskan bagaimana basis teologisnya. Dalam hemat penulis, *pertama*, dari sisi lingkungan masyarakat Islam itu dicirikan dengan banyaknya ketersediaan air jernih yang mengalir, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun tumbuhan dan pertanian. Penulis masih ingat, ketika Universitas Muhammadiya Yogyakarta (UMY) akan menyusun pedoman hidup Islami warga kampus, Professor. Dr. Syamsul Anwar, ketua Majelis Tarjih PP. Muhammadiyah, memberikan nasihat bahwa penting kiranya menjadikan ketersediaan air yang mengalir sebagai kriteria dari kampus Islami. Hal ini dengan merujuk kepada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 25, dimana bagi orang beriman Allah akan anugerakan Surga yang mengalir sungai-sungai padanya.

(2) *“Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan: "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu". Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya.”*

Penulis rasanya patut bercerita bagaimana di sini, di Finlandia, betapa melimpahnya ketersediaan air jernih. Pemerintah kota menyediakan saluran-saluran air yang baik ke rumah-rumah penduduk dan apartemen. Sehingga kita bisa dengan mudah mendapatkannya. Dan air yang disalurkan tersebut, kualitasnya sangat baik. Semua masyarakat meminumnya secara langsung, dengan tanpa dimasak, baik di rumah maupun di kampus. Padahal di musim dingin, sungai dan danau membeku. Ini patut dijadikan sebagai contoh, betapa beradab-nya peradaban air di Finlandia, dibandingkan dengan di kita di Indonesia, dimana kita harus selalu membeli air untuk kita konsumsi sehari-hari, untuk rapat, untuk di rumah, untuk masak, dan untuk mandi melalui PDAM. Bahkan di beberapa tempat, baik di perkotaan maupun pedesaan Indonesia, masyarakat kekurangan air dan membelinya dengan harga yang mahal. Air sumur yang mengering akibat dari tidak terkendalinya konsumsi air tanah dan menghitamnya air sungai akibat dari limbah kimia. Masyarakat berkonfik akibat sumber mata air diklaim oleh perusahaan. Padahal air adalah kebutuhan dasar manusia. Para fislup di masa Yunani sampai pada kesimpulan, airlah sebagai sumber dan asal-muasal dari kehidupan (Gaarder, 1996). Allah nyatakan dalam al-Qur’an surat al-Haj ayat 63:

(3) “*Apakah kamu tiada melihat, bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijau? Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.”*

Kedua, karakteristik lingkungan dari masyarakat Islam yang sebenarnya adalah ketersediaan pohon dan ruang terbuka hijau. Sebagaimana kita bisa merujuk pada surat Saba ayat 15. Di negri Saba itu “*jannatani an-yaminin wa simalin*”, terdapat pohon dan buah-buahan yang ranum di kiri dan kanannya. Keberadaan pohon dan hutan sangatlah penting bagi kehidupan baik sebagai penyedia oksigen maupun pengendali air. Dengan banyaknya menghirup oksigen dari pohon maka kita menjadi sehat. Di Finland ada kepercayaan masyarakat, untuk menjadi sehat itu kita harus sering-sering masuk ke hutan untuk terus memperbaharui kualitas oksigen di dalam tubuh kita. Penyakit-penyakit tertentu bisa disembuhkan dengan banyak beraktivitas di dalam hutan. Dan sejauh mata memandang, dalam perjalanan pertama penulis dari Helsinki ke North Karelia, yang terlihat adalah pohon-pohon rindang dan hutan basah (wetland) yang lebat. Di kampus, di kota, di perkampungan, maka yang terlihat adalah pohon-pohon yang rindang.

(4) “Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun".

Lebih-lebih pohon memiliki fungsi untuk mengendalikan air di saat musim hujan, dimana daun pohon yang berjatuhan merupakan sumber makanan dari cacing. Lalu cacing membentuk pori-pori yang berfungsi untuk menyerap air dimusim hujan dan mengeluarkannya di musim kemarau. Akibat masifnya deforestasi dan hilangnya ruang terbuka hijau, maka yang kita saksikan di Indonesia adalah banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Dalam hemat penulis, maka kita bisa mengatakan semakin terjaga hutan di suatu daerah, atau semakin banyak ruang terbuka hijau di suatu kota, maka semakin Islami sebetulnya daerah dan kota tersebut. Begitupun dengan perkampungan, lingkungan kampus, sekolah, dan

rumah sakit, semakin banyak pohon rindang yang ada di sekitarnya, maka semakin Islami lah kampung, kampus, sekolah, dan rumah sakit tersebut.

Imam Jalaludin As-Suyuti dan Al-Mahalli menambahkan kesitimewaan dari negri Saba itu tidak ada nyamuk, tidak ada lalat, tidak ada kutu, dan negrinya wangi (As-Suyuthi and Al-Mahalli, 2003). Hal ini menunjukan tidak hanya banyak pohon dan buah-buahan di kanan kirinya, tetapi juga bersih. Tidak ada nyamuk, menunjukan saluran pembuangan air tertutup dan tertata rapi. Tidak ada lalat, menggambarkan tidak adanya sampah yang terurai. Tidak ada kutu, masyarakat sadar akan kebersihan tubuh masing-masing, dan negrinya wangi tidak bau amis ataupun pesing. Betapa indahnya peradaban yang seperti itu. Istana Al-Hamra di Spanyol saat Islam memimpin peradaban di sana diceritakan memiliki karakteristik seperti itu, wangi semerbak, tanpa nyamuk, dan tanpa sampah. Kriteria tanpa nyamuk, lalat, dan sampah ini, pernah diceramahkan oleh sekretaris PP. Muhammadiyah Dr. Abdul Mu'ti di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Dan terakhir, secara individual, sebagai orang yang beriman, karakterisitik masyarakat Islam itu memiliki keasadaran bahwa alam ini merupakan ciptaan dan tanda kekuasaan Allah. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 164 bahwa "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari berupa air, lalu dengan air itu". Semua yang kita lihat dari alam semesta ini merupakan pancaran dan cahaya dari kekuasaan Allah. Sementara cahaya itu sendiri sulit untuk ditangkap oleh indra. Ketika cahaya itu tiada maka benda-benda pun akan menjadi tiada. Begitulah setiap benda yang kita temukan, pada hakikatnya ia merupakan pantulan dari cahaya, yang apabila cahaya itu tiada maka benda-benda pun akan tiada. Dan tidak mungkin cahaya itu tiada, karena cahaya menjadi sebab sebagai asal-muasal dari setiap benda.

Di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 115 ada ungkapan, "Kemana saja engkau menghadap di sanalah wajah Allah." Hal ini menunjukan keasadaran orang beriman akan keberadaan Allah yang selalu hadir dari setiap apa yang ditemukannya. Sehingga bagaimana mungkin bagi orang yang beriman, memiliki keinginan untuk merusak alam semesta, untuk menghancurkan pohon, menghancurkan tanah, dan mengotori air apabila dia sadar bahwa semua itu adalah bukti kekuasaan Allah. Tantangannya, bagaimana nilai ini tidak hanya dipahami secara individual tetapi harus bisa menjadi etika bersama masyarakat Islam yang sebenarnya. Apalagi sebagaimana manusia, Allah telah menitipkan bumi ini kepada kita, karena Allah telah memilih manusia sebagai "khalifatullah fil ard". Makhluk yang bertanggung jawab untuk melestarikan dan menjaga kesimbangan dari bumi ini. Rusak, hancur dan lestarinya bumi ada di tangan kita.

Peran Dan Tantangan Majelis Lingkungan Hidup

Untuk mewujudkan cita-cita dakwah dari kriteria masyarakat Islam yang sebenarnya itu, Muhammadiyah berdasarkan pada putusan Mukatamar 2005 di Malang telah memiliki Lembaga Lingkungan Hidup yang kemudian hari berubah menjadi Majelis Lingkugan Hidup (MLH), PP. Muhammadiyah. Di dalam diskusi-diskusi yang penulis ikuti selama berkhidmat bersama majelis ini, langkah utama yang ditempuh oleh MLH adalah ingin memberikan kesadaran kepada umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah akan pentingnya masalah lingkungan. Dalam pandangan pimpinan MLH PP. Muhammadiyah, peradaban itu sangat erat kaitannya dengan kebiasaan dan prilaku manusia. Apabila umat Islam sudah memiliki kesadaran lingkungan, maka secara otomatis cita-cita peradaban lingkungan islami itu akan terwujud. Maka MLH PP. Muhammadiyah menerbitkan buku-buku, baik yang sifatnya

Pendidikan maupun panduan. Seperti misalkan buku “Teologi Lingkungan”, “Menyelamatkan Bumi Melalui Perbaikan Aklaq dan Pendidikan Lingkungan”, “Panduan Gerakan Shadaqah Sampah”, “Aksi Hijau di Kantor”, dan “Panduan Penggunaan Air”.

Selain itu, secara aktiv, dalam menindak lanjuti amanah dakwah di abad industry 4.0 dari pengajian ramadhan PP, Muhammadiyah tahun 2018, MLH PP. Muhammadiyah mewujudkannya dengan mengaktivkan kembali Fcebook, Twitter, Instagram, dan Chanel YouTube. Semua itu ditujukan untuk menyebarluaskan dakwah lingkungan Muhammadiyah ke generasi milenial mellaui *flyer-flyer* yang diambil dari ayat-ayat al-Qur’an dan hadits berkenaan dengan issue-issue lingkungan, Lebih-lebih, secara atraktive, MLH PP. Muhammadiyah memilki *website* “lingkunganmu.com” yang berfungsi untuk memberitakan, sebagai syiar, seluruh aktivitas Muhammadiyah, baik di tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting yang berknaan dengan dakwah lingkungan. Di dalam website tersebut, juga diupload seluruh dokumen dan buku yang telah diterbitkan oleh MLH PP. Muhammadiyah.

Dalam tetataran kebijakan organisatoris, melalui Rapat Kerja Nasional, MLH PP. Muhammadiyah yang diselenggarakan pada tahun 2016, telah ditetapkan pokok-pokok kebijakan utama dakwah lingkungan Muhammadiyah yaitu Shadaqoh Sampah, Audit Lingkungan Mandiri Muhammadiyah (ALIMM), Sekolah Sungai Muhammadiyah, Sekolah Adiwiyata Muhammadiyah, dan kerjasama Perhutanan Sosial dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Istilah shadaqoh sampah digunakan berbeda dengan Bank Sampah, dan ini sifatnya prinsipil. Dimana di dalam shadaqah sampah siapapun bisa bersedekah dengan sampah. Sehingga selain lingkungan bersih, juga mendapatkan pahala dari sedekah sampah tersebut. ALIMM ditujukan untuk melakukan audit terhadap bangunan-bangunan sekolah atau rumah sakit Muhammadiyah, apakah sudah ramah lingkungan atau belum, baik dari segi penggunaan energy maupun saluran limbah padat dan cairnya. Sementara Sekolah Sungai Muhammadiyah, saat ini baru dilaksanakan sebagai percontohan di Sungai Code Yogyakarta, sebagai bentuk dakwah melestarikan daerah aliran sungai yang bisa dikembangkan di daerah-daerah lainnya. Dan dalam perhutanan sosial, MLH PP. Muhammadiyah membantu Fakultas-Fakultas Kehutanan di kampus Muhammadiyah untuk memiliki Hutan Pendidikan.

Secara organisatoris, dalam menguatkan insitusi MLH, di periode ini MLH PP. Muhammadiyah telah Dua kali menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional, dan Rapat-Rapat Kerja Regional, per wilayah, seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Indinesia Timur, dan yang akan dilangsungkan wilayah Sumatera. Seluruh PWM di Indonesia, alhamdulillah sudah memiliki MLH atau bergabung dengan Majelis lain. Akan tetapi belum seluruh PDM dan PCM di Indonesia memiliki MLH. Hal ini tentu menjadi tantangan dalam melakukan konsolidasi untuk membumikan dakwah lingkungan Muhammadiyah.

Tentu saja dakwah lingkungan yang dimotori oleh MLH PP. Muhammadiyah masih jauh dari sempurna. Ada beberapa issue yang harus diresponse di dalam melakukan dakwah lingkungan ke depannya. Pertama, MLH PP. Muhammadiyah perlu kiranya melakukan kajian prinsipil terhadap al-Qur’an dan as-Sunnah, dengan melibatkan berbagai pakar, untuk menggali, menafsirkan, memahami, ayat-ayat dan hadits-hadits yang berkenaan dengan lingkungan. Seperti misalkan bagaimana kita memandang hutan, climate change, daerah aliran sungai, wilayah pesisir, sampah, menurut al-Qur’an dan hadits? Hasilnya bisa menjadi Fiqih Lingkungannya Muhammadiyah. Walaupun saat ini sudah ada buku Fiqih Lingkungan yang diterbitkan oleh MLH PP. Muhammadiyah, akan tetapi perlu kajian yang lebih dalam dan comprehensive bekerjasama dengan Majelis Tarjih, sehingga bisa lahir kajian mendalam

seperti Fiqih Bencana yang dimiliki oleh MDMC. Hasil dari kajian tersebut, bisa menjadi basis utama dari langkah gerak dawah lingkungan Muhammadiyah.

Kedua, perlu adanya komitmen bersama dari seluruh pimpinan MLH, baik ditingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah, untuk mendedikasikan diri dalam dakwah lingkungan bersama Muhammadiyah. Selama ini, penulis melihat, termasuk diri penulis sendiri, hampir rata-rata pimpinan di pusat, wilayah, dan daerah, memiliki kesibukan masing-masing, baik di amal usaha maupun di non-amal usaha. Menjadi rektor, Dekan, Pejabat Eselon, sehingga waktu yang tersedia untuk dakwah di bidang lingkungan sangatlah terbatas, bahkan bisa dikatakan hanya sebagai waktu sisa. Kita di MLH Pusat, Wilayah, dan Daerah patutut belajar, kepada almarhum, Drs. Said Tuhuleley yang telah mendedikasikan waktunya untuk berdakwah bersama Muhammadiyah. Apalabila seluruh kita memiliki komitmen yang teguh, maka kekuatan MLH dalam berdakwah akan sangat luar biasa. Mungkin minimal, bagi kita, bisa menyisihkan waktu Tiga hari dalam seminggu untuk kepentingan dakwah lingkungan Muhammadiyah.

Ketiga, perlunya penguatan jaringan MLH PP Muhammadiyah dengan komunitas internasional. Di Eropa misalkan, issue lingkungan menjadi sentral didiskusikan di mana-mana. Menjadi program perusahaan, sekolah, dan sektor-sektor lainnya. Beasiswa program doctoral dan master rata-rata saat ini diarahkan untuk riset-riset yang berhubungan dengan issue-issue penyelamatan lingkungan. Sekarang kita masih belum maksimal mendapatkan peluang jaringan ini. Ke depan, kita perlu melakukan komunikasi dengan institusi-institusi di tingkatan Internasional tersebut. Langkah awal yang bisa kita lakukan bagaimana kita mengenalkan MHL Muhammadiyah kepada mereka dengan menyediakan website dalam Bahasa Inggris dan menterjemahkan buku-buku terbitan MLH PP. Muhammadiyah. Dan terakhir, perlunya melakukan regenerasi dengan merekrut kader-kader lingkungan dari ortom seperti Pemuda dan NA, IMM, IPM, HW, dan Tapak Suci. Sehingga, kita bisa menyiapkan kader-kader masa depan lingkungan yang akan menggerakan dakwah lingkungan di seluruh Indonesia.

Penutup

Sebagai penutup, di dalam melakukan dakwah, prinsip MLH PP. Muhammadiyah mengedepankan cara-cara "*mauidoh hasanah*". MLH PP. Muhammadiyah tidak ingin melakukan kritik prontal terhadap siapapun, baik pemerintah, swasta, maupun pihak lainnya. Karena prinsipnya, MLH PP. Muhammadiyah bersahabat dengan siapapun. Dakwah tidak boleh menyakiti yang lain dan dakwah harus dilakukan dengan cara yang baik "*Caina herang, laukna beunang*". Dengan kerasnya kritik kita terhadap pemerintah atau sektor swasta tidak menjadikan masalah lingkungan akan semakin ringan dan selesai. Akan tetapi dengan bekerja bersama-sama dengan siapapun, maka mudah-mudahan menjadikan masalah besar bisa diselesaikan dengan ringan. Yang harus selalu kita tunjukan bagaimana memberikan contoh sebagai *uswah hasanah* dari akhlak Islam yang agung dan mulia ini. Semoga Allah selalau memberikan kekuatan kepada kita di dalam menjaga amanah bumi yang kita sama-sama jaga kelestariannya ini.

REFERENSI

As-Suyuthi J and Al-Mahalli J. (2003) Tafsir jalalain. *Beirut: Dar al-Fikr*.

Gaarder J. (1996) Sophie's World: A Novel about the History of Philosophy, trans. Paulette Møller. New York: Berkeley Books.

Grafton RQ. (2000) Governance of the Commons: A Role for the State? *Land Economics*: 504-517.

Hardin G. (1968) The tragedy of the commons. *science* 162: 1243-1248.

Harris JM. (2000) Basic principles of sustainable development. *Dimensions of Sustainable Development; Seidler, R., Bawa, KS, Eds*: 21-41.

Katsir I. (1999) Tafsir al-Qur'an al-Azhim. *Riyadl: Dar Taiyibah Li al-Tauzi'wa al-Nasyr*.

Markus S. (2009) Masyarakat Islam Yang Sebenar-benarnya. *Sumbangan Pemikiran, Jakarta: Civil Islamic Institute bekerjasama dengan UHAMKA dan UM Malang*.

McCarthy JF. (2010) Processes of inclusion and adverse incorporation: oil palm and agrarian change in Sumatra, Indonesia. *The Journal of Peasant Studies* 37: 821-850.

Nashir H. (2010) *Muhammadiyah gerakan pembaruan*: Suara Muhammadiyah.

Nesadurai HE. (2018) Transnational Private Governance as a Developmental Driver in Southeast Asia: The Case of Sustainable Palm Oil Standards in Indonesia and Malaysia. *The Journal of Development Studies*: 1-17.

Ostrom E. (1990) *Governing the commons*: Cambridge university press.

Peluso NL. (1993) Coercing conservation?: The politics of state resource control. *Global environmental change* 3: 199-217.

Sachs JD. (2015) *The age of sustainable development*: Columbia University Press.

Safitri MA. (2010) Forest Tenure in Indonesia: the socio-legal challenges of securing communities' rights. Faculty of Law, Leiden University.

Sen AK. (2001) *Development as freedom*: Oxford University Press.

Ul Haq M. (1995) *Reflections on human development*: oxford university Press.

Urdal H. (2005) People vs. Malthus: Population pressure, environmental degradation, and armed conflict revisited. *Journal of Peace Research* 42: 417-434.

POLITIK INKLUSIF MUHAMMADIYAH

Narasi Pencerahan Islam untuk Indonesia Berkemajuan

Politik inklusif menjadi topik utama dalam buku ini. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang telah berkembang pesat sejak 1912 berada pada landasan inklusivitas. Di satu sisi, Muhammadiyah adalah gerakan pemurnian (purifikasi), di sini yang lain terjadi dinamisasi di tubuh organisasi ini tanpa meninggalkan jejak asal. Perpaduan antara pemurnian dan dinamisasi menunjukkan bahwa gerakan inklusivitas menjadi fondasi Muhammadiyah untuk dapat *survive* sepanjang zaman, *saleh li kulli zaman wa al-makaan*. Politik inklusif Muhammadiyah tidak hanya dipahami dalam arti sempit politik kekuasaan atau politik kepemiluan, tetapi jauh lebih luas lagi, bahwa politik inklusif yang dilakukan oleh Muhammadiyah juga menyentuh wilayah pemberdayan ekonomi rakyat, filantropi, kebencanaan, lingkungan hidup, konstitusi, dan pedamaian global.

Empatpuluhtiga artikel yang dikelompokkan dalam lima bab sebagaimana tertuang dalam buku ini ditulis oleh para intelektual Muhammadiyah dari berbagai kalangan yang memiliki perspektif berbeda-beda, tetapi mereka pada dasarnya memiliki kesamaan pandangan: Muhammadiyah telah memberi bukti nyata dalam mengaktualisasikan Islam berkemajuan di berbagai dimensi kehidupan. Inilah narasi pencerahan Islam untuk sebuah cita-cita bernama: INDONESIA BERKEMAJUAN.

UMY PRESS

"Menguna-gang Mencerahkan"
TANWIR MUHAMMADIYAH
BENGKULU

PUSAT STUDI MUHAMMADIYAH DAN PERUBAHAN SOSIAL POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

ISBN 978-623-90189-1-7
9 786239 018917